

Jakarta, 25 November 2025

EXECUTIVE SUMMARY

PRAKTIK BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB: MELAMPAUI KEPATUHAN, MENDORONG PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
dan Sektor Pertambangan

Jl. Hang Lekiu II No. 41
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

1. LATAR BELAKANG

Penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) telah berkembang menjadi standar global dalam tata kelola perusahaan modern. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas dari komunitas internasional, dunia usaha dituntut tidak hanya untuk mematuhi hukum nasional, tetapi juga bertanggung jawab secara aktif atas dampak sosial dan lingkungan dari seluruh kegiatan operasionalnya.

Dalam konteks Indonesia, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pertambangan menjadi dua sektor strategis yang paling disorot karena memiliki kontribusi ekonomi yang besar sekaligus menyimpan risiko dampak HAM yang tinggi. Konflik lahan, degradasi lingkungan, risiko keselamatan kerja, serta kerentanan masyarakat adat dan komunitas lokal menjadi karakteristik utama dari risiko sektor ini.

RBC Benchmark disusun sebagai instrumen untuk memberikan gambaran faktual dan terukur mengenai sejauh mana perusahaan telah mengintegrasikan prinsip *Responsible Business Conduct* (RBC) ke dalam kebijakan dan praktik operasional. Penelitian ini mencakup **39 perusahaan**, yang terdiri dari **21 perusahaan sektor kelapa sawit** dan **18 perusahaan sektor pertambangan**. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang **terdaftar di bursa saham, sedang dalam proses penawaran umum perdana (IPO)**, serta perusahaan dengan operasi strategis di Indonesia, meskipun secara hukum terdaftar di bursa luar negeri

2. METODOLOGI

Penilaian dalam laporan ini menggunakan kerangka *Corporate Human Rights Benchmark* (CHRB) – *Core UNGP Indicators* yang selaras dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) dan OECD *Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, serta dikontekstualisasikan dengan kebijakan nasional termasuk Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Metodologi disusun berdasarkan dua variabel utama, yaitu variabel normatif dengan bobot enam puluh persen dan variabel aktual dengan bobot empat puluh persen. Variabel normatif menilai kesiapan sistem perusahaan melalui analisis kebijakan tertulis, struktur kelembagaan, penerapan uji tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence/HRDD*), serta mekanisme pengaduan dan pemulihan. Variabel aktual menilai realitas risiko HAM melalui penelusuran tuduhan pelanggaran serius dan kualitas respons perusahaan yang bersumber dari data publik kredibel.

3. CARA PENENTUAN SKOR

Penentuan skor dalam RBC *Benchmark* dilakukan menggunakan pendekatan penilaian terstruktur yang menggabungkan bobot variabel, kualitas pemenuhan indikator, serta konsistensi bukti yang dapat diverifikasi. Pengukuran dan penentuan skor menggunakan skala 1-100, yang merefleksikan tingkat kematangan penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Proses penghitungan skor dimulai dengan penilaian terpisah atas variabel normatif dan variabel aktual. Variabel normatif diberi bobot enam puluh persen (60%) dan mencerminkan kesiapan sistem, sementara variabel aktual memiliki bobot empat puluh persen (40%) dan mencerminkan kondisi risiko serta dampak nyata di lapangan. Hasil keduanya kemudian digabungkan untuk menghasilkan skor akhir.

4. TEMUAN UTAMA – VARIABEL NORMATIF

Tata Kelola dan Kebijakan

Sub-Variabel ini menilai apakah perusahaan memiliki komitmen formal terhadap HAM, keterlibatan pimpinan senior, komitmen pekerja, komitmen pemulihan jika terjadi dampak HAM, serta komitmen terhadap HAM dalam rantai pasok. Perusahaan juga dinilai berdasarkan ruang lingkup kebijakan mereka: apakah mencakup pekerja, pihak ketiga, dan masyarakat sekitar

Hasil penilaian menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit memperoleh skor rata-rata variabel normatif sebesar **75,70** dengan

kategori ***improving***, sementara sektor pertambangan mencapai **81,19** dengan kategori ***Intermediate***.

Pada sub-variabel tata kelola dan kebijakan, sektor kelapa sawit memperoleh skor **79,84**, sedangkan sektor pertambangan mencapai **83,70**. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan telah memiliki komitmen tertulis terhadap penghormatan hak asasi manusia, hak-hak pekerja, serta rujukan terhadap standar internasional. Namun demikian, laporan mencatat bahwa kualitas kebijakan belum sepenuhnya merata. Sejumlah perusahaan masih menempatkan kebijakan HAM sebagai bagian dari laporan keberlanjutan, bukan sebagai kebijakan operasional yang berdiri sendiri dan memiliki daya ikat langsung terhadap seluruh fungsi bisnis.

Kondisi ini berdampak pada lemahnya integrasi kebijakan ke dalam praktik operasional dan proses pengambilan keputusan. Laporan menunjukkan bahwa pada banyak perusahaan, kebijakan HAM belum sepenuhnya terhubung dengan sistem manajemen risiko, prosedur operasional standar, dan mekanisme pengawasan internal.

Internalisasi Penghormatan terhadap HAM dalam Budaya dan Sistem Manajemen Perusahaan

Sub-Variabel ini menilai bagaimana perusahaan menginternalisasikan kebijakan

HAM ke dalam struktur organisasi. Fokusnya adalah sejauh mana pimpinan senior bertanggung jawab atas isu HAM, serta bagaimana fungsi-fungsi internal lain—seperti SDM, operasi, legal, dan keberlanjutan—dilibatkan dalam pengelolaan risiko HAM.

Berdasarkan laporan, sektor kelapa sawit memperoleh skor rata-rata **69,05**, sedangkan sektor pertambangan memperoleh skor **77,78**. Skor ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki tingkat pelembagaan yang lebih baik, meskipun pada kedua sektor masih ditemukan keterbatasan dalam kejelasan mandat fungsi HAM, alokasi sumber daya, dan integrasi isu HAM dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Secara umum, laporan mencatat bahwa sebagian besar perusahaan telah memiliki struktur internalisasi yang jelas, namun masih menempatkan fungsi HAM sebagai bagian dari unit tanggung jawab keberlanjutan, sosial atau fungsi hukum tanpa mandat operasional yang kuat.

Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence)

Sub-Variabel HRDD menilai bagaimana perusahaan mengidentifikasi risiko HAM, menilai dampak yang ada, memprioritaskan risiko yang paling penting, mengintegrasikan hasil penilaian ke dalam proses bisnis, memonitor efektivitasnya, serta mengkomunikasikan hasilnya secara terbuka.

Uji tuntas HAM dinilai melalui sub-variabel HRDD dan menunjukkan bahwa sektor

kelapa sawit memperoleh skor rata-rata **76,29**, sementara sektor pertambangan mencapai skor **84,00**. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah memiliki mekanisme dasar untuk mengidentifikasi dan memetakan risiko HAM.

Namun laporan menegaskan bahwa pelaksanaan HRDD masih dominan bersifat administratif. Dalam banyak kasus, HRDD dijalankan sebagai kewajiban pelaporan yang diintegrasikan pada Penentuan Topik Material, bukan sebagai alat strategis untuk mencegah dampak sebelum terjadi. Laporan juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan belum memiliki mekanisme HRDD dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko aktual dan potensial dampak HAM yang meragukan, sehingga HRDD belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus pengambilan keputusan strategis.

Mekanisme Pengaduan dan Pemulihan

Sub-Variabel ini menilai apakah perusahaan memiliki mekanisme pengaduan bagi pekerja maupun masyarakat eksternal, termasuk menilai efektivitas mekanisme pengaduan yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan dinilai apakah mereka menyediakan atau berkontribusi dalam pemulihan ketika terjadi dampak negatif terhadap HAM.

Mekanisme pengaduan menunjukkan pola yang konsisten di kedua sektor. Ketersediaan kanal pengaduan bagi pekerja dan komunitas

berada pada skor yang sangat tinggi, mendekati **90,00**. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan telah menyediakan prosedur formal dan saluran komunikasi untuk menerima keluhan.

Namun kualitas pemulihan berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Di sektor kelapa sawit, skor pemulihan berada pada kisaran **58,57**, sementara sektor pertambangan mencatat **57,78**. Laporan menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketersediaan kanal pengaduan dengan kemampuan perusahaan untuk menunjukkan bukti remediasi yang terdokumentasi dan terverifikasi.

Dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan perusahaan pada dua sektor telah memiliki mekanisme pengaduan sudah tersedia dan berfungsi, tetapi pemulihan dampak HAM masih belum menjadi praktik yang mapan. Ke depan perlu memperkuat dokumentasi remediasi, mengembangkan prosedur pemulihan yang mengutamakan korban, dan meningkatkan transparansi melalui *case log* publik yang mencatat proses dan hasil penyelesaian kasus.

5. TEMUAN UTAMA – VARIABEL AKTUAL

Penilaian variabel aktual menunjukkan bahwa risiko pelanggaran HAM masih bersifat nyata dan berulang. Sektor kelapa sawit memperoleh skor rata-rata **55,71**, sementara sektor pertambangan hanya mencapai **33,89**. Skor ini mencerminkan tingkat temuan kasus yang signifikan, terutama pada sektor pertambangan.

Pada sektor kelapa sawit, angka ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi sekitar **lima hingga enam kasus pelanggaran HAM**, termasuk kasus yang bersifat serius dan berulang. Temuan dominan muncul pada dua kelompok korban terdampak. Respons publik telah dilakukan, namun belum disertai remediasi yang berdampak nyata.

Sementara pada sektor pertambangan, angka ini mencerminkan tingkat risiko yang lebih serius. Rata-rata perusahaan menghadapi sekitar **delapan kasus pelanggaran HAM**. Kasus-kasus ini tersebar merata di aspek lingkungan, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta hak pekerja. Respons publik perusahaan dinilai masih sangat minim.

Temuan kasus mencakup konflik lahan dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, serta pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Pada sektor kelapa sawit, tuduhan dampak lingkungan umumnya berkaitan dengan pencemaran air dan kerusakan lahan di tingkat lokal. Pada sektor pertambangan, pola dampak bersifat lebih luas, mencakup pencemaran sungai, wilayah pesisir, serta gangguan terhadap ruang hidup masyarakat.

Laporan juga mencatat bahwa isu *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dan relokasi komunitas muncul dengan kompleksitas yang lebih tinggi di sektor pertambangan. Tuduhan terkait masyarakat adat menunjukkan tantangan yang berulang dalam penghormatan terhadap hak kolektif dan proses konsultasi bermakna.

Respons perusahaan terhadap tuduhan serius sebagian besar masih bersifat reaktif. Banyak perusahaan memberikan klarifikasi umum, namun hanya sedikit yang mampu menunjukkan investigasi independen serta pemulihan yang berdampak langsung. Dalam banyak kasus, laporan menilai bahwa respons perusahaan masih lebih berorientasi pada pengelolaan risiko reputasi dibanding pemulihan substansial bagi korban.

Laporan juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara indikator keluaran dan dampak. Banyak perusahaan melaporkan jumlah pelatihan, jumlah sosialisasi, dan jumlah keluhan yang ditangani, namun belum mampu menunjukkan perubahan nyata terhadap kondisi HAM di lapangan. Minimnya penggunaan indikator berbasis dampak memperlihatkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi masih berfokus pada aktivitas, bukan hasil.

6. KATEGORI PERUSAHAAN PADA MASING-MASING SEKTOR:

A. Sektor Kelapa Sawit

Pada sektor kelapa sawit, hanya ada **dua perusahaan** yang berada pada **kategori BHR *Intermediate Company* dengan rating BBB dan skor masing-masing 84 dan 82, memiliki keunggulan yang menonjol pada** pelebagaan struktur tata kelola paling mapan dan maju, serta pengembangan HRDD yang sistematis,

Kemudian, terdapat **tiga perusahaan** pada **kategori BHR *Improving Company* dengan rating BB dan skor antara 73,6-71**

memiliki keunggulan yang menonjol pada bekerjanya mekanisme pengaduan formal yang berjenjang, telah melaksanakan HRDD, namun belum terstruktur dan terjadi pelembagaan yang kokoh.

Tiga perusahaan berikutnya pada kategori **BHR *Early Adopting Company* dengan rating B dan skor 69** memiliki keunggulan yang menonjol pada aspek pengelolaan risiko dan fondasi yang cukup baik untuk HRDD, namun masih lemah pada salah satu dari tiga aspek, yaitu penanganan risiko aktual, publikasi kerangka remediasi, dan efektivitas remediasi.

Sedangkan 11 perusahaan lainnya berada pada kategori BHR *Early Adopting Company* dengan rating B dan rentang skor antara 61,2 hingga 67,6. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti memiliki struktur formal namun transparansi remediasi terbatas, memiliki struktur formal namun konsistensi lintas unit masih terbatas, dan sebagainya.

Dua perusahaan lainnya pada sektor kelapa sawit berada pada kategori BHR *Emerging Company* dengan rating C serta skor masing-masing 59,6 dan 54,4 masih berada pada fase awal adopsi dan integrasi prinsip-prinsip BHR.

B. Sektor Pertambangan

Pada sektor pertambangan, dari 18 perusahaan yang dinilai, hanya ada

dua perusahaan berada pada kategori BHR *Improving Company* dengan rating BB dan skor masing-masing 73 dan 71. Mereka memiliki keunggulan pada struktur tata kelola HAM yang solid dan menunjukkan kekuatan pada standar ketenagakerjaan.

Tujuh perusahaan berikutnya berada dalam kategori BHR *Early Adopting Company* dengan rating B dan skor antara 62 hingga 69. Mereka memiliki keunggulan pada fondasi kebijakan stabil atau menunjukkan kerangka kebijakan paling komprehensif atau memiliki mekanisme pengaduan dan HRDD atau menunjukkan integrasi kebijakan BHR ke dalam sistem operasional.

Sedangkan 5 perusahaan lainnya berada pada kategori BHR *Early Adopting Company* dengan rating B dan rentang skor antara 60 hingga 61. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti memiliki fondasi kebijakan yang cukup kuat namun masih menghadapi tantangan transparansi remediasi.

Empat perusahaan lainnya pada sektor tambang berada pada kategori BHR *Emerging Company* dengan rating C serta rentang skor antara 53,8 hingga 59. Mereka masih berada pada fase awal adopsi tata kelola HAM.

KESIMPULAN

Laporan RBC *Benchmark* menunjukkan bahwa perusahaan di sektor kelapa sawit dan pertambangan telah membangun fondasi kebijakan dan kerangka tata kelola HAM yang relatif kuat. Namun tantangan utama

masih terletak pada kualitas implementasi di tingkat operasional, khususnya dalam pelembagaan fungsi HAM, efektivitas HRDD, dan kualitas pemulihan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada ruang yang luas untuk *continuous improvement* (Perbaikan Berkelanjutan), dikarenakan belum ada satu pun perusahaan yang berada pada posisi *established*, yakni perusahaan telah menjadikan prinsip bisnis dan HAM sebagai sesuatu yang *embedding* di dalam sistem dan manajemen tata kelola perusahaan, serta tidak ditemukannya tuduhan atas dampak aktual pelanggaran HAM yang serius. Kalaupun keberadaan dan operasionalisasi perusahaan menyebabkan risiko atau dampak HAM, perusahaan memberikan respons publik yang relevan, tepat waktu, dan substantif terhadap tuduhan serius, dengan menjelaskan posisi perusahaan serta langkah awal yang diambil setelah tuduhan muncul.

Modalitas kuat dalam fondasi kebijakan dan tata kelola dalam implementasi prinsip bisnis dan HAM secara normatif, mesti paralel dengan upaya untuk meminimalisir dan memberikan pemulihan yang efektif melalui *stakeholders engagement* dan pelaksanaan HRDD yang terukur dan terlembaga.

PENUTUP

Laporan ini berfungsi sebagai baseline nasional praktik bisnis dan HAM di Indonesia. RBC *Benchmark* memberikan gambaran terukur mengenai kesiapan dan kinerja perusahaan dalam mengelola risiko HAM dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan, pemerintah, dan investor dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Lebih lanjut temuan penting di dalam laporan menegaskan perlunya penguatan regulasi, termasuk percepatan *mandatory HRDD* di Indonesia. Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik aktual menunjukkan bahwa pendekatan sukarela belum cukup mendorong perubahan. Regulasi yang lebih kuat diperlukan agar perusahaan wajib mengadopsi sistem uji tuntas HAM yang komprehensif, transparan, dan akuntabel.

RBC *Benchmark* juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong perubahan sistemik di sektor kelapa sawit dan pertambangan. Dengan memberikan pemetaan komprehensif atas komitmen dan kinerja HAM, laporan ini membantu perusahaan, pemerintah, investor, dan masyarakat sipil menentukan prioritas perbaikan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong tata kelola bisnis yang lebih bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Deskripsi Skor Variabel Normatif

Skor (Skala 10-100)	Status	Justifikasi dan Keterpenuhan Sub-Variabel
90	Meet	Sub-Variabel A: kebijakan HAM jelas, terintegrasi, disahkan direksi, dan berlaku hingga rantai pasok. Sub-Variabel B: struktur manajemen HAM berjalan, dengan unit, sumber daya, dan mandat jelas. Sub-Variabel C: HRDD dilaksanakan secara reguler, mencakup identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring, dan komunikasi publik. Sub-Variabel D: mekanisme pengaduan efektif, memenuhi 8 kriteria UNGPs, dan menyediakan remediasi yang dapat diverifikasi.
70	Partially meet	Sub-Variabel A: kebijakan HAM komprehensif dan merujuk standar internasional, tetapi belum mencakup seluruh pemangku kepentingan. Sub-Variabel B: ada pejabat/unit HAM, tetapi belum berjalan optimal lintas fungsi. Sub-Variabel C: perusahaan telah melakukan HRDD, tetapi belum menyampaikan evaluasi efektivitas atau belum melibatkan pemangku kepentingan terdampak. Sub-Variabel D: mekanisme pengaduan tersedia dan berfungsi, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria UNGPs
50	Partial	Sub-Variabel A: ada kebijakan HAM, tetapi belum lengkap atau tidak mencakup rantai pasok. Sub-Variabel B: integrasi HAM belum terstruktur, biasanya hanya ditangani divisi keberlanjutan. Sub-Variabel C: identifikasi risiko ada, tetapi belum ada penilaian dan tindak lanjut. Sub-Variabel D: mekanisme pengaduan tersedia, namun belum menunjukkan efektivitas atau prosedur jelas.
30	Not meet	Sub-Variabel A: komitmen tidak merujuk standar HAM internasional. Sub-Variabel B: tidak ada sistem formal integrasi HAM dalam organisasi. Sub-Variabel C: perusahaan tidak mengidentifikasi atau menilai risiko HAM. Sub-Variabel D: mekanisme pengaduan ada tetapi tidak relevan atau tidak dapat diakses pihak terdampak.
15	Basic	Ketersediaan komitmen perusahaan untuk menghormati HAM.

LAMPIRAN

Lampiran 2 – Deskripsi Skor Variabel Aktual

Skor	Justifikasi dan Deskripsi Skor
100	- Tidak terdeteksi kasus - Perusahaan sudah memiliki mekanisme respons dan pemulihan terhadap kasus yang disebabkan langsung oleh perusahaan.
80 – 90	- Terdapat 1 Kasus terdeteksi - Skor akan semakin menuju angka minimal ketika ditemukan kasus yang bersifat <i>irremediable</i> (kasus dengan luas terdampak, cakupan dan korban yang signifikan)
65 – 79	- Terdapat 2 kasus terdeteksi - Skor akan semakin menuju angka minimal ketika ditemukan kasus yang bersifat <i>irremediable</i> (kasus dengan luas terdampak, cakupan dan korban yang signifikan) - Temuan kasus dominan di salah satu aspek korban terdampak.
40 – 64	- Terdapat 5 sampai 6 kasus terdeteksi - Skor akan semakin menuju angka minimal ketika ditemukan kasus yang bersifat <i>irremediable</i> (kasus dengan luas areal terdampak, cakupan dan korban yang signifikan, serta berulang/<i>prolonged</i>) - Temuan dominan di dua aspek korban terdampak. - Respons publik dilakukan, namun tidak ada remediasi berdampak.
30 – 39	- Terdapat 8 kasus terdeteksi - Skor akan semakin menuju angka minimal ketika ditemukan kasus yang bersifat <i>irremediable</i> (kasus dengan luas terdampak, cakupan dan korban yang signifikan, serta berulang/<i>prolonged</i>) - Temuan kasus merata di seluruh aspek korban terdampak (Lingkungan, Masyarakat Adat & Komunitas Lokal, serta Pekerja) - Respons publik yang dilakukan perusahaan sangat minim.
10 – 29	- Terdapat 9 kasus terdeteksi - Skor akan semakin menuju angka minimal ketika ditemukan kasus yang bersifat <i>irremediable</i> (kasus dengan luas terdampak, cakupan dan korban yang signifikan, serta berulang/<i>prolonged</i>) - Temuan kasus merata di seluruh aspek korban terdampak (Lingkungan, Masyarakat Adat & Komunitas Lokal, serta Pekerja) - Perusahaan tidak memberikan respons publik efektif.

LAMPIRAN

Lampiran 3 - Penentuan Skor, Maturity Level dan Rating Perusahaan

Maturity Level	Skor Total	Penilaian huruf	Keterangan
Established	90 – 100	A	Perusahaan telah menjadikan prinsip bisnis dan HAM sebagai sesuatu yang <i>embedding</i> di dalam sistem dan manajemen tata kelola perusahaan, serta tidak ditemukannya tuduhan atas dampak aktual pelanggaran HAM yang serius. Kalaupun keberadaan dan operasionalisasi perusahaan menyebabkan risiko atau dampak HAM Perusahaan memberikan respons publik yang relevan, tepat waktu, dan substantif terhadap tuduhan serius, dengan menjelaskan posisi perusahaan serta langkah awal yang diambil setelah tuduhan muncul.
Intermediate	81 – 90	BBB	Perusahaan telah memiliki komitmen kebijakan, pelaksanaan HRDD secara reguler, komunikasi publik atas dampak HAM melalui stakeholders <i>engagement</i> , dan alokasi sumber daya khusus untuk menangani fungsi HAM
Improving	71 – 80	BB	Perusahaan telah menyusun komitmen tertulis di dalam regulasi dan kebijakan internal, telah melaksanakan HRDD, namun belum terstruktur dan terjadi pelembagaan yang kokoh.
Early Adopting	60 – 70	B	Perusahaan telah menyusun komitmen tertulis di dalam regulasi dan kebijakan internal terkait tanggung jawab penghormatan (HAM UDHR, UNGPs, Konvenan ILO, OECD, serta standar bisnis dan HAM lainnya), serta menyusun framework untuk pelaksanaan proses HRDD
Emerging	30 – 59	C	Perusahaan memulai internalisasi pengetahuan dan pemahaman BHAM namun belum terjadi pelembagaan.

Dengan kombinasi variabel normatif dan variabel aktual, maka dinamika dan fluktuasi skor, juga rentang status *emerging* hingga *established*, dipengaruhi oleh *quantitative scoring* dan *qualitative fact checking*. Perusahaan yang secara normatif memiliki skor kuantitatif tinggi dapat terkoreksi secara signifikan apabila melalui pemeriksaan aktual, perusahaan teridentifikasi menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM yang serius tanpa mekanisme pemulihan yang efektif.

LAMPIRAN

Lampiran 4 – Skor Variabel Normatif per Sektor

Sektor	Skor Rata-rata
Kelapa Sawit	7,570
Pertambangan	8,119

Lampiran 5 – Skor Sub-Variabel Normatif

Sub-Variabel	Kelapa Sawit	Pertambangan
Tata Kelola dan Kebijakan	7,984	8,370
Internalisasi Penghormatan HAM	6,905	7,778
Uji Tuntas HAM (HRDD)	7,629	8,400
Mekanisme Pengaduan & Pemulihan	7,762	7,926

Lampiran 6 – Risiko Aktual per Sektor

Sektor	Total Skor Rata-rata	Deskripsi
Sektor Kelapa Sawit	5,571	Terdapat 5 sampai 6 kasus terdeteksi pada perusahaan. Ditemukan kasus yang bersifat <i>irremediable</i> (kasus dengan luas areal terdampak, cakupan dan korban yang signifikan, serta berulang/prolonged). Temuan dominan di dua aspek korban terdampak. Respon publik dilakukan, namun tidak ada remediasi berdampak.
Sektor Pertambangan	3,389	Terdapat 8 kasus terdeteksi pada perusahaan. Ditemukan kasus yang bersifat <i>irremediable</i> (kasus dengan luas terdampak, cakupan dan korban yang signifikan, serta berulang/prolonged). Temuan kasus merata di seluruh aspek korban terdampak (Lingkungan, Masyarakat Adat & Komunitas Lokal, serta Pekerja). Respons publik yang dilakukan perusahaan sangat minim.

LAMPIRAN

Lampiran 7 – Kinerja Mekanisme Pengaduan

Sektor Kelapa Sawit

Indikator	Skor
Kanal Pengaduan Pekerja	8,810
Kanal Pengaduan Komunitas	8,619
Remediasi	5,857

Sektor Pertambangan

Indikator	Skor
Kanal Pengaduan Pekerja	8,400
Kanal Pengaduan Komunitas	9,000
Remediasi	5,778

Lampiran 8 – Tipologi Kasus/Risiko Aktual Berdasarkan Kelompok Terdampak

Aspek / Kelompok Terdampak	Tipologi Kasus / Tindakan
Lingkungan	Dampak lingkungan sering tidak muncul dalam dokumen normatif, namun memiliki eksposur risiko paling tinggi secara faktual. Rentang lebih sempit karena tingkat keparahan cenderung homogen di seluruh perusahaan. Tindakan yang relevan meliputi pencemaran air dan degradasi sumber air penting, pencemaran udara akibat emisi industri, kerusakan tanah, hilangnya tutupan lahan atau deforestasi, risiko keselamatan lingkungan seperti jebolnya fasilitas limbah, serta gangguan terhadap ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati.
FPIC (Masyarakat Adat) dan Komunitas Lokal	Penilaian mempertimbangkan ada atau tidaknya proses FPIC, keberlangsungan sengketa lahan atau konflik agraria, serta dampak terhadap ruang hidup komunitas adat seperti penggusuran, hilangnya sumber daya tradisional, dan kawasan sakral. Risiko meningkat ketika ditemukan intimidasi atau kriminalisasi warga dan komunitas lokal, serta pelanggaran hak atas informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Pekerja	Mencakup risiko PHK sepihak atau massal, pembatasan kebebasan berserikat dan berunding kolektif, serta tingginya angka kecelakaan kerja termasuk insiden fatal. Skor dipengaruhi oleh paparan bahan berbahaya akibat kelalaian standar K3, ketidakpastian status kerja melalui kontrak, outsourcing, atau pekerja harian, serta pelanggaran hak dasar seperti upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman.

LAMPIRAN

Lampiran 9 - Hasil Penilaian Perusahaan

A. Perkebunan Kelapa Sawit

Peringkat	Nama Perusahaan	Skor Dasar Variabel Normatif	Skor Dasar Variabel Aktual	Skor Variabel Normatif (60%)	Skor Variabel Aktual (40%)	Total skor	Letter Rating (Penilaian Huruf)	Kategori Penghargaan
1	PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk	8,667	80	52	32	84	BBB	BHR Intermediate Company
2	First Resources Limited	8,333	80	50	32	82	BBB	BHR Intermediate Company
3	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk	7,933	65	476	26	736	BB	BHR Improving Company
4	PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk	8,000	60	48	24	72	BB	BHR Improving Company
5	Asian Agri Group	8,500	50	51	20	71	BB	BHR Improving Company
6	Wilmar International Limited (Wilmar Group Indonesia)	8,500	45	51	18	69	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk	8,167	50	49	20	69	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Astra Agro Lestari Tbk	8,167	50	49	20	69	B	BHR Early Adopting Company

LAMPIRAN

Lampiran 9 - Hasil Penilaian Perusahaan

A. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Peringkat	Nama Perusahaan	Skor Dasar Variabel Normatif	Skor Dasar Variabel Aktual	Skor Variabel Normatif (60%)	Skor Variabel Aktual (40%)	Total skor	Letter Rating (Penilaian Huruf)	Kategori Penghargaan
7	PT. Eagle High Plantations Tbk	7,600	55	456	22	676	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Palma Serasih Tbk	7,600	55	456	22	676	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Cisadane Sawit Raya Tbk	7,600	55	456	22	676	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Mahkota Group Tbk	7,600	55	456	22	676	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk	7,600	55	456	22	676	B	BHR Early Adopting Company
8	PT. FAP Agri Tbk	7,267	55	436	22	656	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Jaya Agra Wattie Tbk	7,600	50	456	20	656	B	BHR Early Adopting Company
9	PT. Sampoerna Agro Tbk	7,600	45	456	18	636	B	BHR Early Adopting Company

LAMPIRAN

Lampiran 9 - Hasil Penilaian Perusahaan

A. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Peringkat	Nama Perusahaan	Skor Dasar Variabel Normatif	Skor Dasar Variabel Aktual	Skor Variabel Normatif (60%)	Skor Variabel Aktual (40%)	Total skor	Letter Rating (Penilaian Huruf)	Kategori Penghargaan
8	PT. FAP Agri Tbk	7,267	55	436	22	656	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Jaya Agra Wattie Tbk	7,600	50	456	20	656	B	BHR Early Adopting Company
9	PT. Sampoerna Agro Tbk	7,600	45	456	18	636	B	BHR Early Adopting Company
10	PT. Salim Ivomas Pratama Tbk	7,433	45	446	18	626	B	BHR Early Adopting Company
11	Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)	6,933	50	416	20	616	B	BHR Early Adopting Company
12	PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk	6,533	55	392	22	612	B	BHR Early Adopting Company
13	PT. Pradiksi Gunatama Tbk	6,267	55	376	22	596	C	BHR Emerging Company
14	PT. Andira Agro Tbk	5,067	60	304	24	544	C	BHR Emerging Company

LAMPIRAN

Lampiran 10 - Hasil Penilaian Perusahaan

A. Sektor Pertambangan

Peringkat	Nama Perusahaan	Skor Dasar Variabel Normatif	Skor Dasar Variabel Aktual	Skor Variabel Normatif (60%)	Skor Variabel Aktual (40%)	Total skor	Letter Rating (Penilaian Huruf)	Kategori Penghargaan
1	PT. Bumi Resources Tbk	8,833	50	5,300	2,000	73	BB	BHR Improving Company
2	PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)	8,500	50	5,100	2,000	71	BB	BHR Improving Company
3	PT. Timah Tbk	8,167	50	4,900	2,000	69	B	BHR Early Adopting Company
4	PT. Freeport Indonesia	8,833	30	5,300	1,200	65	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Tri Megah Bangun Persada Tbk. (HARITA Nickel)	8,833	30	5,300	1,200	65	B	BHR Early Adopting Company
5	PT. Medco Energi Internasional Tbk	8,667	30	5,200	1,200	64	B	BHR Early Adopting Company
6	PT Merdeka Copper Gold Tbk	8,500	30	5,100	1,200	63	B	BHR Early Adopting Company
7	PT. Kaltim Prima Coal	8,333	30	5,000	1,200	62	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Vale Indonesia Tbk	8,333	30	5,000	1,200	62	B	BHR Early Adopting Company
8	PT. Amman Mineral Internasional Tbk	8,167	30	4,900	1,200	61	B	BHR Early Adopting Company

LAMPIRAN

Lampiran 10 - Hasil Penilaian Perusahaan

A. Sektor Pertambangan

Peringkat	Nama Perusahaan	Skor Dasar Variabel Normatif	Skor Dasar Variabel Aktual	Skor Variabel Normatif (60%)	Skor Variabel Aktual (40%)	Total skor	Letter Rating (Penilaian Huruf)	Kategori Penghargaan
9	PT Aneka Tambang Tbk	8,100	30	4,860	1,200	606	B	BHR Early Adopting Company
10	PT. Harum Energy Tbk	8,000	30	4,800	1,200	60	B	BHR Early Adopting Company
	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	8,000	30	4,800	1,200	60	B	BHR Early Adopting Company
	PT Bukit Asam Tbk	8,000	30	4,800	1,200	60	B	BHR Early Adopting Company
11	PT. Bayan Resources Tbk	7,167	40	4,300	1,600	59	C	BHR Emerging Company
12	PT. Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID)	7,600	30	4,560	1,200	576	C	BHR Emerging Company
13	PT. Alamtri Resources Indonesia Tbk	7,133	30	4,280	1,200	548	C	BHR Emerging Company
14	PT. Berau Coal Energy Tbk	6,967	30	4,180	1,200	538	C	BHR Emerging Company